

**”UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL”**

(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di
Pasuruan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

MEIDINAR RAGIL PAWENING

NPM : 0941010033

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

”UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL”
(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan
Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Disusun Oleh :

Meidinar Ragil Pawening

NPM. 0941010033

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing

Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

Mengetahui,
DEKAN

Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 195507181983022001

”UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL”
(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan
Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Disusun Oleh :

Meidinar Ragil Pawening

NPM. 0941010033

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 18 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

2.

Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

3.

Tukiman, S.Sos, M.Si
NIP. 196103231989031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**”UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL”**
(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan
Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : Meidinar Ragil Pawening
NPM : 0941010033
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

Menyatakan bahwa proposal ini telah direvisi dan disahkan
Pada Tanggal 25 Juni 2013

Mengetahui / Menyetujui :

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dosen Penguji III

Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

Tukiman, S.Sos, M.Si
NIP. 196103231989031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi Sosial" (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Di Pasuruan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Sri Wibawani, M.Si sebagai dosen pembimbing. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini diantaranya :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. DR. Lukman Arif, M.Si, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Bangil Pasuruan.
4. Orang tua saya yang memberikan doa dan kasih sayang selalu.
5. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

**"UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL"**

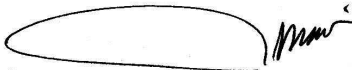
(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan
Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : Meidinar Ragil Pawening
NPM : 0941010033
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

Menyatakan bahwa proposal ini telah direvisi dan disahkan
Pada Tanggal 25 Juni.....2013

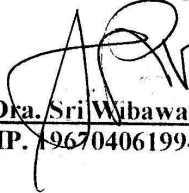
Mengetahui / Menyetujui :

Dosen Penguji I



Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Dosen Penguji II



Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

Dosen Penguji III



Takiman, S.Sos, M.Si
NIP. 196103231989031001

**"UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL"**

(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan
Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Disusun Oleh :

Meidinar Ragil Pawening

NPM. 0941010033

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur

Pada Tanggal : 18 Juni 2013

Pembimbing



Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

Tim Penguji :

1.



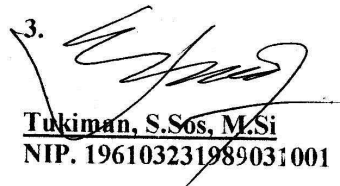
Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

2.



Dra. Sri Wibawani, Msi
NIP. 196704061994032001

3.



Tukiman, S.Sos, M.Si
NIP. 196103231989031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jawa Timur**



Dra. Ec. H. Satriawati, MSI
NIP. 195507181983022001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**"UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL"
(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan
Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur)**

Disusun Oleh :

Meidinar Ragil Pawening

NPM. 0941010033

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dra. Sri Wihawani, Msi
NIP. 196704061994032001

Mengetahui,

DEKAN



Dra. Ec. H. Suparwati, MSI
NIP. 195507181983022001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Revisi	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel.....	xi
Abstraksi	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	16
1. Pembangunan Masyarakat	16
a. Pengertian Pembangunan	16
b. Tujuan Pembangunan	17
c. Nilai Filosofis Pembangunan.....	17
d. Perencanaan Pembangunan.....	18
e. Pembangunan Sosial.....	20
2. Kesejahteraan Sosial	21
a. Pengertian Kesejahteraan	21
b. Pengertian Kesejahteraan Sosial.....	22
c. Karakteristik Kesejahteraan.....	25
3. Kebijakan Publik.....	25
a. Pengertian Kebijakan Publik	25

b. Sifat Kebijakan Publik.....	27
c. Manfaat Kebijakan Publik	28
d. Tujuan Kebijakan Publik	29
e. Faktor Kebijakan Publik	29
4. Kebijakan Sosial	30
a. Pengertian Kebijakan Sosial	30
b. Tujuan Kebijakan Sosial.....	32
5. Rehabilitasi Sosial.....	34
a. Pengertian rehabilitasi	34
b. Pengertian rehabilitasi Sosial.....	34
6. Pemberdayaan.....	35
a. Pengertian Pemberdayaan.....	35
b. Tujuan Pemberdayaan	40
c. Dimensi Pemberdayaan	42
d. Indikator Pemberdayaan	43
e. Strategi Pemberdayaan	46
f. Upaya Pemberdayaan	47
7. Penyandang Cacat	49
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997	52
9. PP No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.....	53
C. Kerangka Berfikir	55
 BAB III. Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber dan Jenis Data	60
E. Informan dan Teknik Penarikan Informan	61
F. Teknik Pengumpulan Data	63
G. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian	67
1. Standarisasi Umum Panti	67
2. Visi, Misi dan Motto.....	69
3. Tujuan dan Sasaran.....	69
4. Proses Pelayanan	70
5. Sumber Daya Manusia	76
6. Kerjasama.....	83
7. Keberhasilan yang dicapai	83
8. Pembiayaan	84
9. Bagan susunan organisasi UPT	86
B. Hasil Penelitian	87
1. Bimbingan Sosial.....	87
2. Bimbingan Ketrampilan.....	106
C. Pembahasan	116
1. Bimbingan Sosial.....	118
2. Bimbingan Ketrampilan.....	125

BAB V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137

Daftar Pustaka

ABSTRAKSI

MEIDINAR RAGIL PAWENING, UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT MELALUI REHABILITASI SOSIAL (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL CACAT TUBUH di PASURUAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR).

Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan yang mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya yang menimbulkan permasalahan sosial antara lain adalah ketidak berfungsian sosial, yaitu penyandang cacat kurang mampu melaksanakan peran-peran sosialnya secara wajar dan hal ini yang semakin meyakini pandangan masyarakat untuk meremehkan kemampuan penyandang cacat dengan kekurangan fisiknya. Upaya untuk mensejahterakan penyandang cacat dengan cara melaksanakan program rehabilitasi sosial melalui tahap bimbingan sosial dan ketrampilan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial (studi pada dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial cacat tubuh di pasuruan).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah bimbingan sosial dan bimbingan ketrampilan. Dengan sasaran kajian yaitu bimbingan sosial perorangan, bimbingan sosial kelompok, bimbingan sosial kemasyarakatan, ketrampilan menjahit, elektronika, servis handphone dan sablon/percetakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Analisa data dalam Penelitian ini dengan menggunakan model interaktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan yaitu upaya peningkatan kesejahteraan melalui bimbingan sosial perorangan, kelompok, masyarakat dan bimbingan ketrampilan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan batiniah, lahiriah dan sosial sehingga penyandang cacat mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak dan kewajiban dengan tidak ada rasa kasihan sebagai perlakuan khusus dalam lingkungan sosial sehingga mencapai peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat tubuh.

Kata Kunci : kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial & penyandang cacat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi (Pasal 4 UUD 1945). Maka tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Segenap bangsa Indonesia yang dimaksud dalam pembukaan UUD adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan usia, golongan, suku, agama, tempat tinggal, dan sebagainya termasuk tidak membedakan status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, golongan/pangkat, maupun keadaan fisik dan mental yaitu penyandang cacat atau bukan. Jadi, pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang cacat tubuh.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semua aparat pemerintah, masyarakat atau semua manusia diharapkan menjunjung tinggi asas persatuan dan kesatuan bangsa, diantaranya dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melakukan perbedaan tetapi tetap proporsional berkeadilan. Pada kenyataannya, masih terdapat

perbedaan seperti, agama, suku/ras dan lainnya yang dijadikan alasan timbulnya konflik sehingga untuk menjunjung rasa persatuan dan kesatuan yang menuju keadilan dan kemakmuran bersama. Munculnya diskriminasi dalam masalah sosial yang sering tidak bisa dielakkan diantaranya kemampuan fisik yang berbeda antara masyarakat dengan keadaan fisik sempurna dibandingkan masyarakat penyandang cacat tubuh.

Perbedaan kesempatan maupun perlakuan terhadap penyandang cacat tubuh dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat akan menimbulkan perbedaan kehidupan sosial maupun ekonomi pada kehidupan penyandang cacat tubuh yang pada akhirnya akan mengarah pada masalah sosial yaitu kemiskinan.

Selain masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi yang dihadapi oleh para masyarakat atau manusia yang mempunyai kekurangan secara fisik atau mental yang bisa disebut cacat yang secara kuantitas cenderung meningkat yang menjadi dasar pertimbangan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dimana disebutkan dalam klausul menimbang poin a. “bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama”.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 dalam pasal 1, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai

kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.

Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan yang mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya. Dampak dari kecacatan tersebut menimbulkan permasalahan sosial antara lain adalah ketidak berfungsian sosial, yaitu penyandang cacat kurang mampu melaksanakan peran-peran sosialnya secara wajar dan hal ini yang semakin meyakini pandangan masyarakat untuk meremehkan kemampuan penyandang cacat dengan kekurangan fisiknya.

Kesenjangan-kesenjangan yang diperoleh penyandang cacat dapat kita lihat pada kesenjangan dalam hal pendidikan dan kesempatan kerja. Hal ini telah banyak terjadi sehingga banyak media yang memberitakan tentang perlakuan yang diskriminatif antara penyandang cacat dengan bukan penyandang cacat. Diantaranya artikel yang ditulis oleh Novian, salah satu mahasiswa Fisip Unair Surabaya tentang diskriminasi masyarakat penyandang cacat bahwa :

para penyedia lapangan pekerjaan kebanyakan enggan untuk menerima seorang penyandang cacat sebagai karyawan. Mereka berasumsi bahwa seorang penyandang cacat tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan lain yang bukan penyandang cacat. Sehingga bagi para penyedia lapangan kerja, mempekerjakan para penyandang cacat sama artinya dengan mendorong perusahaan dalam jurang kebangkrutan karena harus menyediakan beberapa alat bantu bagi kemudahan para penyandang cacat dalam melakukan aktifitasnya.

Kenyataan yang terjadi seperti yang ditulis oleh media tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Demikian juga tentang kewajiban penyandang cacat seperti yang tercantum dalam pasal 7, (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Bila kenyataan yang telah ditulis oleh media tersebut adalah sangat jelas bahwa pemerintah dan masyarakat tidak memberikan kesamaan kesempatan kepada penyandang cacat sedangkan pasal 9 dalam Undang-Undang tentang penyandang cacat menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan.

Asumsi bahwa seorang penyandang cacat tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan seefektif karyawan lain yang bukan penyandang cacat, tidaklah selalu benar. Menurut salah satu pengamat bernama Momo, yang mengatakan bahwa :

tidak sedikit hasil kerja para penyandang cacat yang tidak kalah bahkan banyak juga yang lebih baik dari hasil serupa dari mereka yang normal. Diperkirakan dalam beberapa hal seperti ketekunan, kesabaran, kesungguhan justru tenaga kerja penyandang cacat berada di atas rata-rata prestasi mereka yang bukan penyandang cacat. Dapat dilihat betapa besar potensi para penyandang cacat yang tidak pernah diaktualisasikan, hanya disebabkan oleh kecilnya kesediaan masyarakat memberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa para penyandang cacat dapat melakukan tugas walaupun dengan berbagai kesulitan yang ada.

Terbitnya Undang-Undang tentang penyandang cacat yang pada tahun tersebut (1997) diantaranya karena pertimbangan poin b. yaitu bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu, perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang tentang penyandang cacat maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang penyandang cacat pasal 8 yang menyatakan bahwa pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Serta pasal 16 yang menyatakan bahwa pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan upaya: 1.Rehabilitasi; 2.Bantuan Sosial; 3.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan data tahun 2011, menurut Siswadi, Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, jumlah penyandang cacat di Indonesia berdasarkan data Depkes RI mencapai 3,11% dari populasi penduduk atau sekitar 6,7 juta jiwa. Sementara bila mengacu pada standar yang diterapkan Organisasi Kesehatan Dunia PBB dengan persyaratan lebih ketat, jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 10 juta jiwa (tribunnews.com, 23 Maret 2013).

Menurut ILO, prinsip untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi pada penyandang cacat ini adalah hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dalam semua siklus kehidupan dan pekerjaan untuk semua orang tanpa memandang

kecacatan mereka. Semua orang bebas mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan melakukan pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip, asumsi dan prasangka tentang kecacatan mereka. Ini bukan berarti semua orang punya kemampuan yang sama atau harus diperlakukan dengan cara yang sama, tapi perilaku, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda perlu secara adil dipertimbangkan, dinilai dan didukung, tanpa memandang status kecacatan mereka diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.

Data Depkes tahun 2011 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyandang cacat setiap tahun. Pada tahun 2010 sekitar 5,3 juta jiwa pada tahun 2011 sekitar 6,7 juta jiwa. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat agar diskriminasi terhadap penyandang cacat bisa diperkecil seperti yang diharapkan oleh PP Nomor 43 tahun 1998 yang dalam penjelasan menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri.

Berdasarkan rekapitulasi data orang dengan kecacatan Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sejumlah 70.329 penyandang cacat dari 41. 513 laki-laki dan 28.816 perempuan dengan kecacatan tubuh dewasa dan anak-anak.

Dari data tersebut diatas bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang bukan penyandang cacat. Untuk mewujudkan itu pasal 8 Undang-Undang tentang penyandang cacat mengamanatkan kepada Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Lebih lanjut pasal 3 PP tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat mengamanatkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat. Maka dapat dinyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat adalah bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Masalah penanganan atau upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpedoman pada Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut diatas serta pembagian kewenangan antara pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom bila dikaitkan dengan bidang

sosial khususnya penanganan masalah sosial serta upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang didalamnya terdapat penyandang cacat maka pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sesuai PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dalam pasal 3 poin 11 yaitu bidang sosial memberikan kewenangan dalam bentuk mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.

Berdasarkan peraturan gubernur nomor 119 tahun 2008 bahwa UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan dibawah kendali Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mental, fisik serta ketrampilan terhadap penyandang cacat tubuh yang berada di wilayah Jawa Timur, dengan kapasitas tampung 90 klien per-tahun. Tugas pokok UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan tersebut diatas adalah sebagai pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jawa Timur.

Secara lengkap pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui : a.kesamaan kesempatan; b.rehabilitasi; c.bantuan sosial; d.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi didefinisikan sebagai "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih

pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia” (Banja,1990:615). Menurut Soewito dalam (Sri Widati, 1984:5) menyatakan bahwa Rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi continuous process, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniyah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan Negara.

Keadaan kesejahteraan penyandang cacat tubuh yang awalnya kurang percaya diri, kurang memiliki keberanian untuk maju karena kekurangan fisiknya, tidak mempunyai ketrampilan apapun, makan sehari hanya dua kali dan itupun tidak selalu memenuhi gizi 4 sehat 5 sempurna, pakaian yang kurang layak karena rata-rata tergolong orang yang kurang mampu.

Dengan adanya UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh yang dibangun tahun 1986 diatas areal seluas 30.080 m². Diharapkan penyandang cacat tubuh yang terlantar dan tidak mempunyai ketrampilan apapun, dapat mempunyai ketrampilan, kemampuan, dan keahlian untuk bekerja dengan layak dan dapat diterima di masyarakat tanpa diskriminasi, terpenuhinya gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna demi tercapainya tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hal ini sesuai isi visi UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan yaitu memberikan kontribusi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

penyandang cacat tubuh melalui rehabilitasi sosial, untuk membangun tekad mandiri melalui wujud usaha bersama pemerintah dan masyarakat menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak bagi semua lapisan masyarakat.

Menurut Midgley (1995:14) Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen. Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur, kedua sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.

Uraian dalam latar belakang tersebut diatas mendasari penulis untuk memilih judul penelitian “upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial” (studi pada unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial cacat tubuh di pasuruan dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur).

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya melalui sebuah penelitian. Perumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial” (studi pada unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial cacat tubuh di pasuruan dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang : “upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial” (studi pada

unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial cacat tubuh di pasuruan dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang apa dan bagaimana “upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial” (studi pada unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial cacat tubuh di pasuruan dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur).

2. Bagi Universitas

Menambah rasa kerja sama antara Universitas dan Instansi dalam kegiatan ilmiah, menambah arsip perpustakaan guna kepentingan dalam penelitian dan menambah wawasan baru bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

3. Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai masalah yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial (studi pada unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial cacat tubuh di pasuruan dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur).